E-ISSN: 3025-0994
Halaman 7880-7887
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung

Apriliana Grestiani[1], Tina Miniawati Barusman[2]

[1,2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
e-mail: [1]apriliana.18021033@student.ubl.ac.id, [2]tina@ubl.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai implementasi sistem akuntansi keuangan yang diterapkan pada BPKAD. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan sistem akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Implementasi sistem tersebut telah mendukung proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, hingga penyajian laporan keuangan secara sistematis dan andal. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengendalian internal agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Keuangan Daerah

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Financial Accounting System at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bandar Lampung and to evaluate its compliance with applicable government accounting standards. A well-implemented

financial accounting system plays a crucial role in supporting transparent, accountable, and reliable financial reporting within local government institutions. Such a system also facilitates effective financial management, enhances decision-making processes, and strengthens public accountability in the administration of regional finances. This research employed a descriptive qualitative approach using a case study design to obtain an in-depth understanding of the accounting practices implemented by the agency. Data were collected through direct observation, semi-structured interviews with relevant officials, and documentation of financial accounting procedures, accounting records, and institutional reports. The collected data were analyzed descriptively by comparing existing accounting practices with the requirements stipulated in the applicable regulations. The findings indicate that the Financial Accounting System implemented at the Regional Financial and Asset Management Agency has generally been carried out effectively and is consistent with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards based on the accrual basis. The implementation of this accounting system has supported the processes of recording, classifying, summarizing, and presenting financial statements in a systematic and reliable manner. Nevertheless, continuous improvements are still needed, particularly in strengthening human resource competencies, optimizing the use of information technology, and enhancing internal control systems to further improve the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of regional financial management.

Keywords : *Accounting System, Regional Finance*

LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan keuangan tidak hanya berfokus pada proses penerimaan dan pengeluaran anggaran, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis, transparan, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Menurut Rahmayanti (2019), pengelolaan keuangan meliputi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Seluruh tahapan tersebut membentuk suatu siklus yang saling berkaitan sehingga kesalahan pada satu tahapan akan berdampak terhadap tahapan berikutnya.

Manajemen keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses yang terintegrasi dari satu fase ke fase lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem yang digunakan, khususnya sistem akuntansi keuangan pemerintah. Sistem akuntansi berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, hingga penyajian informasi keuangan secara akurat dan dapat dipercaya. Tanpa adanya sistem akuntansi yang baik, proses penyusunan

laporan keuangan akan berpotensi mengalami kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian data, bahkan penyimpangan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sululing (2017) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan tidak dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh pemahaman akuntansi yang baik. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penerapan sistem akuntansi pemerintah juga merupakan bentuk implementasi reformasi pengelolaan keuangan negara yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui penerapan standar tersebut diharapkan setiap entitas pemerintah mampu menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Standar ini juga menjadi acuan dalam menyusun lima komponen utama laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kewajiban penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang disusun tidak hanya berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran daerah secara transparan dan akuntabel (Hermawati, 2018).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan dalam bentuk opini audit yang terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini WTP merupakan opini terbaik yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu, opini audit dari BPK sering dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan akuntabel.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat pemerintah daerah yang menghadapi berbagai kendala dalam penerapan sistem akuntansi sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Salah satu fenomena tersebut terjadi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih

terdapat beberapa permasalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang memerlukan perbaikan, baik dari aspek penerapan sistem akuntansi, pengendalian internal, maupun kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas penerapan sistem akuntansi keuangan pada instansi pengelola keuangan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Selfiani (2018) mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pandeglang menggunakan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan tersebut memperkuat pentingnya penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam mendukung terciptanya laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian implementasi sistem akuntansi keuangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE

Jenis penelitian dipergunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus. Dari Sugiyono (2017) metode penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui eksistensi variable bebas, baik hanya di satu variable atau lebih (variable dependent ataupun variable independent), tanpa membentuk perbandingan pada variable itu sendiri serta melihat untuk korelasi menggunakan variable lain.

Responden:

a. Pegawai Badan Pengelola Keuangan serta (BPKAD) Kota Bandar Lampung.
b. Pegawai Badan Pengelola Keuangan serta (BPKAD) Kota Bandar Lampung yang menangani keuangan.

Jenis serta asal data, yaitu data utama diperoleh pribadi dari asal melalui proses wawancara pada bagian keuangan serta observasi pribadi pada lapangan, serta data sekunder. Data diperoleh berupa dokumen, laporan, literatur serta penelitian sudah ada sebelumnya terkait menggunakan topik penelitian.

Metode pengumpulan data merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan artinya penelitian dilakukan melalui penelitian pribadi pada tempat kerja BPKAD Kota Bandar Lampung menggunakan pendekatan subjek penelitian serta penelitian kepustakaan yang merupakan suatu metode pengumpulan landasan teori melalui studi buku, karya ilmiah serta

literatur serta sejenisnya menjadi tolak ukur untuk analisis serta penilaian data berasal penelitian lapangan.

Metode analisis data dipergunakan pada penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dipergunakan peneliti merupakan reduksi data. Reduksi data artinya proses menentukan, memfokuskan penyederhanaan, abstraksi serta transformasi data mentah didapatkan asal catatan tertulis pada lapangan. Penyajian data merupakan penyajian menjadi perpaduan berita terstruktur menarik konklusi serta mengambil tindakan, dan menarik konklusi serta memverifikasi, yaitu menarik konklusi pada penelitian kualitatif diperlukan mempunyai pengetahuan baru belum pernah ada, artinya uraian atau uraian perihal objek sebelumnya masih belum jelas, tetapi sesudah diteliti deskripsi atau deskripsi objek lebih jelas.

Populasi Dan Sampel

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung dengan melakukan pendekatan-pendekatan pada objek penelitian, yaitu dengan melakukan observasi & wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Panduan penerapan sistem akuntansi pada BPKAD, penerapan akuntansi akrual memudahkan penyusunan laporan keuangan serta menampilkan laporan keuangan benar sesuai kemampuan SKPD. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang lebih lengkap, akurat, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem ini, seluruh transaksi keuangan dapat dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi, sehingga memudahkan organisasi perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, penerapan akuntansi akrual juga meningkatkan kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengawasan, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.
2. Tahap Persiapan SAPD, SAPD berisi pilihan mekanisme serta teknik akuntansi untuk mengidentifikasi transaksi, membentuk jurnal, memposting pada buku besar, menyiapkan neraca percobaan serta menyajikan laporan keuangan. Tahap persiapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dilakukan dengan menyusun pedoman yang memuat mekanisme, prosedur, serta teknik akuntansi yang akan diterapkan oleh setiap perangkat daerah. SAPD mengatur proses identifikasi setiap transaksi keuangan, pencatatan ke dalam jurnal, pemindahan data ke buku besar, penyusunan neraca saldo, hingga penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tahapan tersebut dirancang agar seluruh proses akuntansi berlangsung secara sistematis, konsisten, dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Norma pencatatan pembukuan pemda pada BPKAD, proses pencatatan pembukuan BPKAD dimulai asal pengelolaan barang daerah dirancang pencatatan transaksinya, lalu pencatatan transaksi tadi disimpan menjadi catatan pengingat, serta lalu dijumlahkan. Proses

pencatatan akuntansi pemda di BPKAD Bandar Lampung yaitu transaksi, jurnal, buku besar, laporan keuangan (laporan realisasi aturan, laporan operasi, neraca, LPE serta CaLK). Norma pencatatan pembukuan pada BPKAD dimulai dari proses identifikasi dan pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan keuangan maupun aset daerah. Setiap transaksi dicatat berdasarkan bukti yang sah, kemudian dijurnal, diposting ke dalam buku besar, dan diringkas untuk menghasilkan laporan keuangan. Tahapan akhir dari proses tersebut adalah penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruh tahapan pencatatan dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan, relevansi, dan akuntabilitas yang tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Table 1. Hasil Penelitian Secara Umum

No.	PP No 71 Th2010	Penerapan BPKAD Bandar Lampung	Keterangan
1.	Komponen laporan keuangan: 1. Lra 2. Sal 3. Laporan Operasional 4. Neraca 5. Laporan Ekuitas 6. Laporan Arus Kas 7. Calk	Komponen laporan keuangan pada BPKAD Bandar Lampung ada 5, yaitu; 1. Lra 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Arus Kas 5. Lp-Sal	Belum sepenuhnya sesuai dengan PP No 71 Th 2010
2.	Pengakuan pendapatan LO: Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi.	Pengakuan pendapatan LO: Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi.	pengakuan pendapatan LO yang diterapkan pada BPKAD Kota Bandar Lampung telah Sesuai dengan PP No 71 Th 2010
3.	Tahap Susunan SAPD: Dilakukannya identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, memposting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.	Tahap Susunan SAPD: Dilakukannya identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, memposting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.	penyusunan SAPD yang dilakukan pada BPKAD Bandar Lampung sesuai dengan PP No 71 Th 2010

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung

Pembahasan

Pada pembahasan Sistem Akuntansi Keuangan di BPKAD Bandar Lampung sudah sinkron menggunakan standar Akuntansi Pemerintahan No 71 2010, dari staf BPKAD Bandar

Lampung. Hampir semua pegawai BPKAD pada Bandar Lampung tahu SAP berbasis akrual sebab hampir seluruh pegawai BPKAD mempunyai pendidikan jurusan akuntansi.

SIMPULAN

Ada pegawai pada Bagian Akuntansi BPKAD Bandar Lampung kurang kompeten ataupun kurang mengenal sistem akuntansi akrual, sebab latar belakang pendidikannya bukan akuntansi. BPKAD Kota Bandar Lampung secara umum sudah mengadopsi sistem akuntansi menggunakan PP nomor 71 2010 perihal standar Akuntansi Berbasis Akrual serta Kementerian Dalam Negeri nomor 64 2013 perihal Penerapan baku Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemda.

DAFTAR PUSTAKA

Alam S, Akuntansi Sma (Jakarta: Esis, 2004)

Anwar, Chairul, Yunita Sari, Dan Tina Miniawati Barusman. (2012). Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum Dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor (Studi Kasus Pada Pt. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021. Jakarta: Bpk Ri.

Badan Pengelola Keuangan Serta Aset Wilayah (Bpkad) Kota Bandar Lampung

Barusman, Tina Miniawati, Tia Rizna Pratiwi, Dan Kiki Fitriani. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung Periode 2013-2015

Dasmaran, Verliani & Tri Yulaeli, Selfiani (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Bpkad) Pendeglang.

Grafik Perkembangan Lkpd Kota Bandar Lampung *: Https://Lampung.Bpk.Go.Id/*

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (5th Ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Https://Bpkadkotabalam.Com/Pmprd (10 November 2021)

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2010 (On – Line), Tersedia Di Http://Www.Bpk.Go.Id/Ihps (23 November 2021)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th Ed.). Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.

Mulyadi “Sistem Akuntansi, 2016

Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2019). *Akuntansi Pemerintahan* (3rd Ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prof Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Serta Rdand (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 36.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Rijali. A, 2018. Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah, Volume (17),

Zanaria, Yulita. 2016 “Tinjauan Implementansi Akuntansi Berbasis Akrual Di Propinsi Lampung.” Akuisisi-Vol 12 No. 2 (Universitas Muhammadiyah Metro).